

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Audiensi dengan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 11 Februari 2020
Waktu : 14.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Menerima Audiensi
Ketua Rapat : Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F.NasDem) didampingi oleh Ir. Mindo Sianipar (Anggota Komisi IV DPR RI/F.PDIP).
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : Hadir Tamu:
1. Hj. Anik Maslachah (Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
2. H. Alyadi Mustofa (Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
3. H. Mahdi (Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
4. Subianto (Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
5. Daniel Rohi (Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
6. Aditya Halindra F. (Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
7. Hj. Ufiq Zuroida (Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
8. Erma Susanti (Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
9. Agatha Retnosari, S.T. (Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
10. Achmad Amir Aslichin (Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);

11. Go Tjong Ping (Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
12. Rohani Siswanto (Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
13. Pranaya Yudha M (Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
14. SW. Nugroho (Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
15. Eko Prasetyo (Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
16. Afa Zhafiri (Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
17. Mirza Ananta (Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
18. Ahmad Iwan Zunaih (Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
19. Dwi Hari Cahyono (Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
20. Ahmad Atho'illah (Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
21. Chusainuddin (Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
22. D. Rudy Prasetya (Diperta & KP Provinsi Jawa Timur);
23. Agustina (Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur);
24. Bambang S. (Staf. Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
25. M. Nasir (Staf. Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur);
26. Happy RH. (Staf. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur).

I. PENDAHULUAN

1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. didampingi oleh Ir. Mindo Sianipar, menerima Audiensi dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur berkonsultasi mengenai permohonan penambahan alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Timur, dibuka pukul 14.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Selanjutnya Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan permasalahan/aspirasi dan konsultasi mengenai permohonan penambahan alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Timur, antara lain:
 - a. Alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 berkurang banyak. Pada Tahun 2020 diajukan sebesar 4,9 juta ton namun Kementerian Pertanian mengalokasikan pupuk bersubsidi sebesar 1,3 juta ton.
 - b. Provinsi Jawa Timur memproduksi komoditas paling beragam, seperti gula, beras, jagung, dll. Apabila dipangkas akan sangat mempengaruhi produktivitas komoditas pertanian
 - c. Dampak pemotongan alokasi pupuk bersubsidi juga dirasakan oleh petani tambak di Lamongan, Tuban, dan Gresik.

- d. Berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur, diharapkan Kementerian Pertanian mengembalikan alokasi seperti tahun sebelumnya.
- e. Jika alokasi pupuk nasional dipotong 10%, seharusnya Provinsi Jawa Timur dipotong 10% pula (realisasinya hingga mencapai 50%).
- f. Saran: alokasi pupuk bersubsidi di Provinsi Jawa Timur dikembalikan ke semula, sehingga tidak ada gejolak.
- g. Kementan menyatakan bahwa adanya Permentan Nomor 1 Tahun 2020 masih bisa mengubah alokasi.
- h. Perlu dilakukan evaluasi mengenai sistem subsidi pupuk.
- i. Mohon bantuan untuk penambahan alokasi pupuk bersubsidi karena Provinsi Jawa Timur hanya mendapatkan alokasi 1,3 juta ton dan harapannya minimal alokasi seperti pada Tahun 2019.
- j. Harapannya agar pupuk bersubsidi dan nonsubsidi tidak terlalu tinggi kesenjangan harganya.

II. TANGGAPAN KOMISI IV DPR RI

1. Perlu adanya pengawasan yang terjadi di perkebunan tebu, karena petani yang mendapatkan subsidi pupuk adalah petani yang hanya memiliki lahan pertanian tidak lebih dari 2 ha.
2. Harus ada ketegasan Kementan dan perlu Sidak RDKK.
3. BumDes sebaiknya menjadi pengecer pupuk di desa.
4. Perum Bulog juga mengharapkan agar kontraktor penyalurannya adalah BumDes (BumDes jadi agen Bulog). Fungsinya memanfaatkan BumDes untuk memotong mata rantai (dengan syarat BumDes dalam bentuk koperasi).
5. Permasalahan pupuk nasional belum pernah diselesaikan secara tuntas dan harapannya DPRD dapat langsung mengecek ke petani.
6. Tertibkan penyaluran subsidi pupuk dengan memberikan kesempatan pada BumDes untuk menyalurkan pupuk.
7. Alokasi asuransi sapi dikurangi, dan menyarankan agar asuransi domba dan kambing diadakan.

III. TANGGAPAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMANTAN

1. Dasar alokasi pupuk bersubsidi berasal dari Kementerian Keuangan
2. Data alokasi disesuaikan dengan rekap dari Provinsi.
3. Provinsi Jawa Timur hanya mendapatkan 50% karena disesuaikan dengan e-RDKK yang diterima Kementerian Pertanian per 19 Desember 2019.

4. Jika terjadi kekurangan pupuk bersubsidi maka bisa meminta alokasi ke Pupuk Indonesia dan data alokasi nantinya akan dikoreksi dan dipantau oleh BPK di akhir tahun.
5. Petani tambak dapat mengajukan pupuk bersubsidi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajukan ke Kementerian Pertanian.
6. Jika ada diskresi maka wewenang pusat dapat mengubah alokasi.
7. Setiap tanggal 20-25 setiap bulannya, Pemerintah Daerah dapat membuka sistem untuk mengecek RDKK dan dapat diubah hingga akhir tahun.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP.196301221991031001